

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Padang Panjang adalah keluaran hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang yang menyatakan bahwa Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang Panjang sebagai instrumen kebijakan ini bertanggung jawab atas kebijakan penanggulangan kemiskinan. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada pihak-pihak yang dianggap penting dan krusial dalam pelaksanaan kebijakan ini sebagai lokus penelitian dan menjadikan masyarakat Kota Padang Panjang sebagai target kebijakan ini. Permasalahan utama pada kebijakan ini adalah masih belum tercapainya tujuan kebijakan ini yaitu mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kota Padang Panjang.

Berdasarkan elaborasi hasil wawancara peneliti dengan informan dan dokumentasi peneliti terkait dengan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan Kota Padang Panjang, serta pembahasan mengenai permasalahan yang dikaitkan dengan model implementasi Van Meter dan Van Horn, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan masih belum tercapai secara maksimal, hal ini dibuktikan dengan kinerja kebijakan penanggulangan kemiskinan, yakni:

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Secara keseluruhan berjalan dengan baik, implementor memahami standar dan tujuan dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Melihat bukti yang jelas dan terstruktur, kebijakan ini sudah menunjukkan kinerja yang baik dalam penanggulangan kemiskinan. Namun tujuan utama dari kebijakan ini yaitu menurunkan angka kemiskinan di Kota Padang Panjang masih belum tercapai.

2. Sumberdaya

Untuk sumber daya anggaran yang ada pada waktu pelaksanaan kebijakan tahun 2020-2022 masih mengalami kendala karena pemerintah masih melakukan *refocusing* dana karena pandemi Covid-19 dan inflasi yang ada di Kota Padang Panjang sehingga sumber daya anggaran dari penanggulangan kemiskinan sedikit terkendala. Sedangkan untuk dana intensif, pemerintah sendiri sebagai pelaksana kebijakan tidak menerapkan sistem intensif untuk OPD yang menyelenggarakan kebijakan penanggulangan kemiskinan tersebut sehingga anggota dari TKPK kurang termotivasi dan memilih untuk bersikap netral terhadap kebijakan yang mereka laksanakan.

3. Komunikasi Antar Organisasi

Pada variabel ini indeks koordinasi sudah berjalan dengan baik dan indikator komunikasi berjalan dengan baik. Karena tidak ditemukan suatu kendala yang menghambat komunikasi dan koordinasi.

4. Karakteristik Agen pelaksana

Tidak ada kendala berarti terkait dengan karakteristik pelaksana, hal ini terlihat dari standar yang berlaku yakni aturan dan sanksi yang mempengaruhi pelaksana, yang diterapkan ketika seseorang melanggar aturan tersebut, yang meningkatkan kinerja pelaksana. Selain itu, indikator struktur organisasi cukup baik karena sangat berkomitmen terhadap implementasi kebijakan sehingga mudah dipantau.

5. Disposisi Agen Pelaksana

Dilihat dari pemahaman agen pelaksana mengenai kebijakan penanggulangan kemiskinan ini masih ada beberapa anggota yang belum paham mengenai kebijakan yang akan mereka laksanakan dikarenakan pergantian jabatan yang kerap terjadi pada kedinasan. Sedangkan untuk sikap kecenderungan agen pelaksana dan intensitas agen pelaksana cenderung menerima kebijakan karena hal tersebut sudah menjadi kewajiban mereka sebagai ASN dalam menjalankan tugas.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Pada variabel ini kondisi sosial, ekonomi dan politik dari kelompok sasaran sendiri tidak menemui kendala yang penting dan dukungan politik dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan, dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Padang Panjang.

6.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan penelitian diatas mengenai Implementasi strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Padang Panjang yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang Panjang selaku implementor dari Kebijakan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Padang Panjang hendaknya lebih meningkatkan kinerja sehingga tujuan utama dari kebijakan tersebut yaitu mengurangi angka kemiskinan di Kota Padang Panjang bisa tercapai.
2. Sebagai implementor, Tim Koordinsai Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang Panjang diharapkan dapat memanfaatkan dan maksimalkan sumberdaya yang tersedia serta memberi prioritas pada program-program tertentu sehingga anggaran yang sudah direncanakan bisa tersalurkan secara maksimal meskipun terjadi kendala pada anggaran untuk kebijakan tersebut.
3. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang Panjang yang terdiri dari berbagai OPD yang ada di Kota Padang Panjang diharapkan mampu mempertahankan komunikasi dan koordinasi baik secara formal maupun secara informal sehingga pelaksanaan kebijakan bisa terimplementasikan dengan maksimal.
4. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan diharapkan dapat lebih meningkatkan pemahaman agen pelaksana terkait dengan kebijakan seperti memberi pelatihan bagi anggota baru yang akan menjalankan kebijakan.